

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Admiistrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tatiek Sri Djamiati, et al., *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.
- Chambell, Hendri, *Blach's Law Dictionary*, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991.
- Lilik Pudjiastuti, *Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan*, USAID-The Asia Fondation, Jakarta, 2013.

INTERNET

- Aji Prasetyo, "Terima Suap dan Gratifikasi Ratusan Miliar, Rita Dituntut 15 Tahun", www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3125d621a69/terima-suap-dan-gratifikasi-ratusan-miliar--rita-dituntut-15-tahun, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
- ANT/ASH, "Begini Uraian Dakwaan Ratu Atut di Kasus Korupsi Alkes", www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt58bfcd527d61c/begini-uraian-dakwaan-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
- Aksara Bebey, "Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih dituntut 8 tahun penjara", www.merdeka.com/peristiwa/mantan-bupati-subang-imas-aryumningsih-dituntut-8-tahun-penjara.html, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018

Setyo Sri, “Analisa Kasus Semen Rembang”,
www.academia.edu/35247298/analisa_kasus_semen_rembang, diakses
pada tanggal 29 Oktober 2018

ARTIKEL DALAM JURNAL

Nugroho SBM, ‘Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya’, *Riptek*, Vol. 2, No. I, Tahun 2008.

Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, ‘Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewah Yogyakarta’, *Mimbar Hukum*, Vol 28, No 2, Juni 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.